

Oposisi Anwar Ibrahim Dan Politik Malaysia

Herdi Sahrasad

Dosen dan peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina

Abstract: *Anwar Ibrahim's political future to lead Malaysia is more opened. Nevertheless, there is no guarantee that he wins the coming election. On behalf of the opposition alliance he leads, Anwar will launch his campaign for the Justice Party, and he would join hands with the pluralists and Chinese race-based parties in Malaysia. In one posting on Twitter on 9/1/2012, Anwar vowed to overthrow the Malaysian government, what the so-called a corrupt regime Under Anwar Ibrahim's opposition movement, there is a strong tendency that the livelihood of Malaysian society, especially in the field of political education, is experiencing a stage of "silent reform" (reform silently) that is structured and led by the educated middle class with the main objective to uphold democracy, clean and good governance.*

Kata Kunci: *Anwar Ibrahim; reform; election; Malaysia*

Pendahuluan

Hari depan politik Anwar Ibrahim untuk memimpin Malaysia makin terbuka. Meskipun demikian, tak ada jaminan ia memenangkan pemilu mendatang. Tapi yang pasti, dengan diputihkan namanya oleh pengadilan, Anwar sekarang boleh secara bebas melakukan kampanye untuk pilihan raya mendatang atas nama aliansi oposisi yang dipimpinnya. Anwar akan berkampanye untuk Partai Keadilan berbasis Islam, dan bergandengan tangan dengan kaum pluralis dan partai berbasis ras Tionghoa di Malaysia.¹

“Saya merasa dibenarkan, namun kami masih punya agenda dan perjuangan. Kita sekarang harus fokus ke pemilu,” tutur Anwar (9/1/12). Dalam salah satu postingannya di Twitter pada 9/1/2012, Anwar berjanji akan menggulingkan pemerintahan Malaysia yang disebutnya rezim korup.

Di bawah gerakan oposisi Anwar Ibrahim, ada kecenderungan kuat bahwa tatanan kehidupan masyarakat Malaysia, terutama di bidang pendidikan politik, tengah mengalami tahapan “silent reform” (reformasi diam-diam) yang secara terstruktur dimotori kelas menengah dan kaum terpelajar dengan sasaran utama menegakkan demokrasi, pemerintahan bersih dan adil.

Sasaran pokok gerakan reformasi di Malaysia lebih ditekankan pada upaya menegakkan Hak Azasi Manusia (HAM), keadilan, dan demokrasi yang memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk berbicara. Gerakan reformasi sejak 1998 merupakan respons masyarakat madani atas pemerintahan Mahathir Mohamad, yang setelah mundur dari arena, digantikan Abdullah Ahmad Badawi, dan kemudian Najib Razak. Pemerintahan UMNO yang otoritarian ini terus mengalami kemunduran legitimasi dan cenderung makin

¹ Mathias Gomes, Stan Lee, “Anwar Will Be the Next Prime Minister, Does Any Bigot Have a Problem With That?”, Malaysia Chronicle, 26 Januari 2012. Baca, “Barisan Nasional Siap Hadapi Anwar Ibrahim”, Koran Tempo, Rabu, 11 Januari 2012. Tom Fuller, “Trial of Opposition Leader Could Reshape Malaysian Politics”, New York Times, 1 Februari 2010.

melemah akhir-akhir ini karena korupsi-kolusi mencekam, pemilu tidak bersih dan politik identitas menguat, serta watak pemerintah yang otoritarian dan tidak amanah.²

Pada 1998-1999, berbagai kalangan tidak yakin reformasi di Malaysia akan berhasil karena format politik dan sistem pers di negara itu tidak mendukung. Format politik Malaysia sejak merdeka didominasi oleh Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) -- partai dominan dalam koalisi Barisan Nasional yang kini memerintah--sedangkan pers di negara itu umumnya dikendalikan oleh partai politik. Namun kini situasi berubah, dan Anwar punya peluang untuk menang.³ Dewasa ini, orang kepercayaan Anwar yakni Khalid Jaafar menilai, konstelasi politik di negaranya sudah berubah karena peta kekuatan UMNO maupun Barisan Nasional tidak lagi seperti pada masa-masa silam.

Pertanyaan yang kini mengemuka antara lain adalah, apakah Malaysia akan menuju era baru dan Anwar memainkan peran penting dalam memotori gerakan pembaruan atau reformasi di negaranya? Menjawab hal ini, Anwar Ibrahim meyakini bahwa pada akhirnya rakyat Malaysia akan menentukan pilihannya, dalam hal ini berkeinginan kuat untuk menuju perubahan yang signifikan, keluar dari kebuntuan yang banyak dialami saat ini.⁵

Salah satu yang didambakan oleh rakyat Malaysia adalah adanya iklim kebebasan, pemerintahan yang bersih dan terbangunnya demokrasi dalam arti sesungguhnya. Paling tidak, Malaysia akan keluar dari keterkungkungan, baik dalam bidang politik, penegakan hukum, maupun ekonomi dan bidang lainnya.

Anwar Ibrahim tampaknya akan tampil sebagai tokoh alternatif di Malaysia, manakala rakyat Malaysia serius mendambakan perubahan, terutama dalam hal pola kepemimpinan, pembangunan demokrasi dan ekonomi bergaya madani sebagaimana kini sedang diusung oleh Anwar Ibrahim. Walau terus dihambat, Anwar terlihat yakin bahwa reformasi di negaranya kini tinggal menunggu waktu yang tepat.

Keberhasilannya mengangkat partainya dalam Pemilu yang baru lalu, membuat sosok Anwar Ibrahim kini benar-benar menjadi lawan tangguh bagi UMNO bersama Barisan Nasional yang kini masih tetap mengendalikan kekuasaan di Malaysia. Apakah UMNO dan Barisan Nasional dapat ditumbangkan?

Anwar menuturkan di hadapan publik bahwa tidak ada kemustahilan dalam hidup ini kalau kita memiliki keyakinan.

“Tidak ada kemustahilan dalam politik kalau kita mendengar suara rakyat. Sebelum pemilu saya beritahu pers di Singapura, kita akan menang 70 kursi di parlemen. Apa meraka kata: mustahil dong. Malam 8 Maret 2008, kita menang 82 kursi. Tidak ada yang mustahil jika kita memiliki keyakinan,” itulah kata Anwar dalam membawa Malaysia menuju perubahan yang signifikan.

Anwar melihat UMNO bersama Barisan Nasional tidak akan selamanya menguasai panggung kekuasaan dan politik di Malaysia. Dia yakin, oposisi juga dapat berjaya di

² Tentang pemerintahan Mahathir Mohamad, lihat James Chin and Ho Kai Leong (Ed.), *Mahathir's Administration: Performance and Crisis in Governance* (Singapura: Times Academic Press, 2002). Lihat juga Ariel Heryanto dan Sumit K. Mandal, *Challenging Authoritarianism in Southeast Asia, Comparing Indonesia and Malaysia* (New York & London: Routledge Curzon, 2003).

Pandangan semacam ini disampaikan oleh pengamat Malaysia dari LIPI, Dr. Alfitra Salam, pada tahun 1998, dan pandangan itu kini berubah karena perubahan situasi di Malaysia sendiri tentunya.

³ Pandangan semacam ini disampaikan oleh pengamat Malaysia dari LIPI, Dr. Alfitra Salam, pada tahun 1998, dan pandangan itu kini berubah karena perubahan situasi di Malaysia sendiri tentunya.

negaranya. Inilah obsesinya, suatu saat nanti, Perdana Menteri Malaysia tidak harus dari orang UMNO atau Barisan Nasional tapi juga dari oposisi.

Apakah Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri Malaysia pertama dari partai oposisi? Memakai keyakinan Anwar, hal itu memang bukan hal yang mustahil. Anwar yakin, jika melihat kondisi UMNO dan Barisan Nasional yang dinilainya sudah keropos, terlebih lagi jika pemilu dapat dilakukan secara jujur dan adil maka oposisi akan dapat memenangkan pemilu.

“Suara kita dalam pemilu yang baru lalu sudah melonjak, padahal pemilunya banyak kecurangan. Kalau curang saja kita dapat suara besar, maka pemilu yang jujur kita akan menang. Suara rakyat menghendaki demikian,” tegas Anwar.

Anwar menyatakan pula, “rekan-rekan intelektual juga tidak mempercayai bisa berlaku tsunami politik di Malaysia. Kenapa mereka tidak memper- cayainya? Karena mereka lebih banyak membaca Michel Foucault, Jacques Derrida, Jurgen Habermas dan Mohammad Arkoun, daripada membaca hati nurani rakyat. Tidak salah membaca teori dan pendekatan tentang post-modernism, deconstruction, bahkan saya anjurkan ulama dan intelektual kita membaca buku-buku Derrida, Habermas dan Arkoun agar tidak ketinggalan. Tetapi jangan lupa apa yang bergelut dan bergolak di dalam hati dan nurani rakyat.”

Anwar Ibrahim adalah murid politik Mohammad Natsir, tokoh Masyumi dan negarawan kita. “Setelah nikah dengan Wan Azizah Wan Ismail, saya bawa langsung ke Abah Natsir untuk minta restu dan bimbingannya,” kata Anwar yang memandang Natsir sebagai ayahandanya. Natsir telah mengajarkan Anwar bagaimana menggabungkan pemikiran idealisme Islam dan tindakan atau tingkah laku politiknya.

Meminjam perspektif Khalid Jaafar, mantan sekretaris pers Anwar Ibrahim, kini Anwar telah memasuki tahap ketiga dalam hayat politiknya. Tahap pertama bermula sebagai pemimpin mahasiswa di Universiti Malaya. Sebagai presiden Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya (PBUM), Anwar memperjuangkan pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Sebagai presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar-pelajar Islam Malaysia (PKPIM), Anwar mula meniupkan kesadaran Islam di kalangan generasi muda. Gerakan ini diteruskan dengan lebih meluas dengan menubuh dan memimpin selama sepuluh tahun Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Meskipun tapak Anwar adalah Melayu-Islam namun sifat inklusif-nya telah terlihat dalam kepemimpinannya sebagai presiden Majlis Belia Malaysia (MBM).

Tahap kedua, Anwar Ibrahim membuat keputusan decisive pada tahun 1981. Desas desus waktu itu adalah ia akan bergabung ke dalam PAS (partai Islam se-Malaya). Dan Presiden PAS ketika itu telah memberikan tawaran. Semua pimpinan ABIM dan PKPIM tahu gosip politik tersebut. Dan hampir kesemua meramalkan dan tidak sedikit yang mau agar Anwar mengambil alih pucuk pimpinan PAS. Namun Anwar kemudian memilih bergabung ke UMNO, dan tumbuh sebagai tokohnya pula. Tahap ketiga adalah langkah Anwar sebagai tokoh oposisi terkemuka dengan Barisan Alternatif-nya.

Anwar Ibrahim sejak semula memang tokoh yang kontroversial. Sebagai seorang pemuda Muslim ia lahir di tengah-tengah masyarakat kosmopolitan di Pulau Penang, yang lebih kosmopolitan daripada masyarakat-masyarakat lain di Malaysia. Ketika menjadi remaja ia pun memasuki ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) dan menjadi salah seorang penganjur utama gerakan Islam di negeri jiran itu. Cap Islam itu tetap lekat padanya karena pengetahuan Islamnya yang baik walaupun kemudian ia memasuki UMNO (United Malay National Organisation).

Ketika menjadi Ketua ABIM, Anwar dikenal sebagai proponen gerakan Islam terkemuka di negeri tersebut. Di berbagai penerbitan, tiada hari berlalu tanpa menyebutkan dirinya sebagai

pemimpin Islam kelak. Hubungannya yang dekat dengan berbagai gerakan Islam di Indonesia melengkapi tanda pengenalan dirinya sebagai calon pemimpin gerakan Islam di masa depan. Pikiran-pikirannya tentang kedudukan agama Islam di negeri jiran itu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari para pemikir di negeri tersebut. Bahkan keislamannya ini menutupi kesukaannya akan buku-buku dengan pemikiran liberal yang ada di Barat.

Dalam perkembangannya, ternyata justru watak yang dibawa oleh baca-an humanistik-ilmiah inilah yang membuat Anwar Ibrahim meninggalkan ABIM, memasuki pemuda UMNO. Sekaligus dia membawakan dua wajah dalam peranan baru tersebut. Di satu sisi, ia tampak sebagai seorang Muslim modern yang mencoba mempertahankan keislamannya di tengah perubahan zaman. Di sisi lain, Islam tidak ditampakkan sebagai agama kolot tetapi sebagai jalan hidup lurus dengan ukuran-ukurannya sendiri. Bersembahyang, berakhlak pribadi yang tinggi dan berpikiran membentuk kembali kehidupan masyarakat yang telah diseret oleh materialisme Barat, merupakan tanda-tanda keagamaannya yang kuat.

Pikiran keagamaan itu dibarengi pula oleh pikiran teknis yang lebih matang. Ia menjadi lebih nasionalis, terikat kepada kesejahteraan semua warga Malaysia dan memperhatikan dunia baru yang ditekuninya dalam kehidupan berbangsa. Demikianlah dia berkembang menjadi aktivis Islam plus Nasionalis Melayu sejati. Dan hal ini pula yang menyeretnya ke dalam dunia politik dan bergaul dengan Perdana Menteri Mahathir Muhammad. Ia rela mengikuti pola yang lima belas tahun sebelumnya ditempuh oleh pemimpin Malaysia itu. Tidak heranlah jika kemudian Perdana Menteri Malaysia pada tahun 90-an mengangkatnya menjadi Wakil Perdana Menteri. Bukankah mereka secita-cita dan memiliki garis pemikiran yang sama? Karena itu, Mahathir membuang jauh-jauh semua politisi Melayu dari persaingan melawan Anwar. Bahkan kemudian Anwar menjadi “putra mahkota” Mahathir, meski akhirnya justru dipecat oleh Mahathir sendiri pada 1998. Anwar kemudian menjadi lawan politik Mahathir, meskipun sebelumnya berhubungan sedemikian baik. Bahkan dalam pertalian keluarga pun keduanya memiliki hubungan yang unik. Karena Wan Azizah, istri Anwar adalah juga sesama dokter yang menjadi kemenakan istri Mahathir.

Para pengamat politik Malaysia bersilang pendapat tentang seberapa besar peluang Anwar Ibrahim menjadi orang nomor satu di Malaysia. Sebagian analisis menilai popularitas Anwar bersinar seiring dengan meningkatnya perasaan anti-pemerintah.

Profesor Joseph Liow, dari S. Rajaratnam School of International Studies, Singapura, menyatakan, sekarang Anwar, Partai Keadilan Rakyat, dan kubu oposisi yang mendukungnya bisa sesegera mungkin melakukan konsolidasi memperkuat bangunan koalisinya, apalagi kredibilitas Anwar semakin terang. Namun tak mudah bagi Anwar untuk menuntaskan keinginannya menjadi orang nomor satu dalam pemilu Malaysia tahun depan. Sebab, penguasa Malaysia saat ini (UMNO) piawai dalam memainkan trik yang bakal mengancam prospek kemenangan oposisi.

Sebagai contoh, putusan pengadilan terhadap Anwar, pada Senin (9/1/2012), diklaim merupakan upaya pemerintah Malaysia (UMNO) yang mulai reformis dengan berlaku independen dan adil. Belum lagi pemerintah selalu menjual hasil survei Merdeka Center yang hasilnya dukungan kepada Najib masih berada pada angka 59 persen.

Dalam hal ini, James Chin, pengamat Malaysia di Universitas Monash, Australia, memprediksi bakal terjadi kompetisi ketat antara penguasa dan pihak oposisi dalam pemilu mendatang. Peluang Anwar besar jika pemilu Malaysia dilakukan adil dan transparan, tapi kondisi saat ini peluangnya masih 50-50.

Namun ada pula analis yang menilai putusan bebas bagi Anwar itu tak ber- dampak apa-apa. “Putusan itu tak berdampak apa pun,” ujar Barry Wain, penulis buku mantan perdana menteri Mahathir Mohamad.

Dalam hal aksi reformasi, Anwar Ibrahim banyak termotivasi dari gerakan reformasi di Indonesia. Dia melihat Indonesia telah mengambil langkah yang begitu drastis, yaitu menuju ke demokrasi yang tulen, bukan demokrasi illiberal dan olok-olok sebagaimana dinilainya kini berlangsung di Malaysia.

Dalam hal ini, reformasi dan demokratisasi yang digerakkan oleh Anwar Ibrahim adalah untuk menuju masyarakat dan negara madani. Anwar sering mengingatkan bahwa, kita berada di Asia Tenggara maka persoalan kita seharusnya berakar kepada masyarakat, kebudayaan dan keperluan Asia Tenggara. Anwar tidak mau Asia terlalu didominasi oleh wacana Barat, baik di bidang ekonomi, politik dan intelektual. Umat Islam Asia Tenggara perlu memulai dialog ketamadunan berdasarkan kedudukan geografi kita, yaitu dengan Cina dan India, dua negara yang sedang muncul sebagai gergasi ekonomi dunia.”

Tokoh Oposisi

Suatu ketika Anwar Ibrahim pernah berujar:

“Saya tak ada masalah pribadi lagi dengan Pak Mahathir Mohamad. Dia memang menzalimi saya, memenjarakan saya tapi itu sudah saya maaf-kan. Persoalannya, saya memang tidak sepaham dengan dia. Bukan soal pribadi tapi menyangkut sistem dalam membangun Malaysia.”

Kezaliman yang dirasakan Anwar Ibrahim setelah pemecatannya oleh PM Mahathir Mohamad sebagai deputy PM pada 1998 dan pengeblosannya ke penjara, membuat Anwar menempuh jalan oposisi yang keras. Nyaris tidak ada figur oposisi terkemuka di Malaysia, selain Anwar Ibrahim.

Namun, tokoh oposisi yang tumbuh dari gerakan mahasiswa Islam ini bukan hanya aktivis Muslim yang berani keluar masuk penjara, melainkan juga cerdas dan bernas pemikirannya. Anwar ada-lah inteligensia Muslim terke- muka di Malaysia yang kaya gagasan, berwatak tranformatif dan imajinatif.

Adalah Anwar yang menyatakan Asia tengah bangkit, seakan menuju zaman baru. Kebangkitan ekonomi Asia bagi Anwar hanyalah satu dimensi dari kebangkitan kembali benua itu secara lebih mendalam, mendasar, dan ber- dampak jauh--sebuah *Renaissance* Asia. Dalam perspektif Anwar, berbeda dengan *Renaissance* Eropa yang kehilangan jiwa karena mempromosikan “humanisme sekular yang tercerabut dari akar agama Judeo-Kristiani”. Sebaliknya, *Renaissance* Asia memiliki fondasi yang kuat pada agama dan tradisi. Dan sementara *Renaissance* Eropa bersifat monolit, Kebangkitan Asia lebih kukuh karena dibangun di atas tradisi yang beragam, “suatu konsor- sium budaya”--Islam, Konghucu, Buddha, Hindu, dan Kristen.¹³ Dengan pikiran besar seperti itu, Anwar masuk ke tema-tema yang lebih spesifik: simbiosis antara Barat dan Timur, demokrasi dan masyarakat madani (*civil society*), keadilan dan hukum, etika dan ekonomi, ekonomi yang manusiawi, keutamaan budaya, Islam di Asia Tenggara, dan masa depan Asia.

Sayangnya, ketika buku Anwar itu terbit pertama dalam edisi aslinya (*The Asian Renaissance*, 1996), dimana waktu itu pertumbuhan ekonomi Asia bertabur angka moncer, ternyata tak lama kemudian, yaitu pada 1997, indikator ekonomi Asia itu hancur. Krisis merenggut Asia secara tiba-tiba. Dan di Malaysia, badai itu mengambil korban yang tidak lain Anwar sendiri. Tak hanya dicopot dari kursi wakil perdana menteri dan menteri keuangan, dia

menjadi paria yang dipenjara. Namun kini Asia bangkit sebagaimana ramalan Anwar sendiri. Sebagaimana Kishore Mahbubani dalam memandangkan masyarakat Asia, Anwar juga percaya akan kemampuan masyarakat Asia membangun kembali peradaban Asia, yang jauh melampaui wilayah ekonomi dan politik praktis.

Anwar mengajak masyarakat Asia agar tidak terbutakan oleh pertumbuhan ekonomi Asia yang moncer dan lupa pada merajalelanya kebusukan suap, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan. Anwar juga khawatir terhadap “praktek agama yang tanpa dimensi moral dan etika”, sehingga tidak memiliki cukup daya untuk mencegah “dekadensi dan erosi moral melalui perilaku serba boleh serta korupsi”.

Sebagaimana dicatat Farid Gaban, sungguh Anwar sebenarnya sangat optimistis bahwa iman atau agama--dalam keragamannya di Asia-- bakal menjadi unsur penting jika bangsa-bangsa Asia ingin “menemukan kembali jiwa-nya serta merekonstruksi peradabannya”. Dia juga mencoba menjawab sejumlah pertanyaan: Mungkinkah membangun sebuah peradaban dari beragam budaya? Bagaimana membangun peradaban baru Asia? Adakah “nilai-nilai Asia” sebenarnya? Adakah sumbangan Asia terhadap gagasan-gagasan universal? Kaya dengan renungan dan pencarian, Anwar menyelam ke dalam relung kesadaran serta khazanah klasik Asia, lalu menyembul dengan sebuah kepercayaan diri untuk siap berdialog--bukannya berkonfrontasi-- dengan Barat. Farid Gaban melihat, Anwar tak terlalu meyakinkan ketika berusaha merekonstruksi apa sebenarnya “Asia” itu-- sebuah konsep yang memang agak kabur bahkan untuk orang Asia sendiri.

Anwar adalah salah satu dari sedikit intelektual kontemporer Asia -kecuali mungkin Dr Soedjatmoko- yang memilih jalan sulit ketimbang sekadar mencampakkan segala hal dari Barat atau, yang karena kelewat terkesima pada Barat, cenderung menafikan miliknya sendiri. Anwar memberi penghormatan khusus kepada “para pelopor Renaisans Asia” yang “mampu men-transendensikan kekhasan budaya untuk mencapai dataran universal”: Muhammad Iqbal (penyair muslim dari Pakistan), Rabindranath Tagore (sastrawan Hindu dari India), Jose Rizal (novelis Kristen dari Filipina), dan Sun Yat-sen (pahlawan nasionalis Cina yang Konghucu).

Kini, tahun 2012, setelah melewati persidangan yang berlangsung hampir dua tahun, Anwar Ibrahim 9 Januari 2012 ini divonis bebas dari dakwaan sodomi jilid II. Sejak awal, pemimpin oposisi Malaysia itu bersikeras membantah dakwaan menyodomi mantan asistennya itu, Mohd Saiful Bukhari Azlan. Anwar menyebut tuntutan tersebut sebagai usaha kotor untuk membunuh karakternya yang dilakukan oleh koalisi Barisan Nasional dalam menghadapi pemilu 2013 mendatang. Warga Malaysia pun menyangsikan tuduhan tersebut. Pada hari ini, Senin (9/1), Pengadilan Malaysia membebaskan tuntutan terhadapnya. “Keadilan telah dilakukan. Saya bebas,” ujar Anwar Ibrahim.

Kasus tudingan sodomi ini merupakan kasus sodomi kedua yang menimpa pria berumur 64 tahun itu dalam hidupnya. Pada tahun 1998 silam, mantan Deputy Perdana Menteri Malaysia itu juga pernah diadili dan dipenjara atas kasus yang sama, meski beberapa tahun kemudian, Anwar pun dibebaskan dari dakwaan sodomi.

Lebih dari satu dekade lalu, Anwar berada di posisi penting yakni sebagai wakil PM Malaysia Mahathir Mohammad. Namun setelah berseteru dengan Mahathir, figur karismatik itu dipecat, dipukuli dan dipenjara atas dakwaan sodomi dan korupsi.

Ketika krisis moneter terjadi pada tahun 1998, perseteruan Anwar-Mahathir pecah. Salah satunya, Mahathir berang dengan seruan Anwar untuk reformasi dan penghentian korupsi dan nepotisme. Anwar pun dipecat dan didakwa melakukan korupsi dan sodomi. Dalam

drama yang menggemparkan Malaysia dan menarik perhatian dunia, Anwar kala itu dibawa ke pengadilan dengan mata lebam karena dipukuli kepala kepolisian Malaysia saat itu.

Pada September 1998, Dr. Munawar Anees, mantan penulis pidato Anwar dan Sukma Darmawan Sasmita Atmadja, saudara angkat Anwar, ditangkap atas kecurigaan melakukan sodomi dengan Anwar. Keduanya divonis hukuman penjara 6 bulan setelah mengaku bersalah atas dakwaan “seks tidak normal” dengan Anwar. Mereka kemudian menarik kembali pengakuan mereka dan mengajukan banding atas vonis tersebut. Alasannya, mereka mengklaim telah dipaksa mengaku bersalah.

Pada 29 September 1998, Anwar muncul di pengadilan dan mengaku tak bersalah atas dakwaan korupsi dan sodomi. Anwar muncul dengan mata lebam akibat dipukuli Inspektur Jenderal Kepolisian Rahim Noor. Belakangan, Rahim yang semula tidak mengakui perbuatannya, akhirnya minta maaf kepada publik atas pemukulan tersebut.

Selama persidangan, sebuah kasur dijadikan barang bukti di pengadilan. Pada kasur tersebut dikatakan terdapat jejak sperma Anwar. Hasil tes DNA menunjukkan sperma di kasur tersebut benar milik Anwar. Namun Anwar membantah kaitan dirinya dengan kasur tersebut. Tim pembela Anwar mengatakan, sampel DNA tersebut bisa jadi telah diambil dari Anwar saat tak sadarkan diri setelah dipukuli di tahanan. Namun Hakim Pengadilan Tinggi Augustine Paul menerima bukti DNA tersebut.

Selama persidangan itu, Mahathir muncul di televisi untuk menjelaskan penangkapan wakilnya itu. Mahathir telah beberapa kali menyebut Anwar bersalah atas sodomi meski persidangan masih berjalan.

Pada 14 April 1999, Anwar dijatuhi vonis hukuman penjara 6 tahun atas dakwaan korupsi. Kemudian pada 8 Agustus 2000, Anwar divonis penjara 9 tahun atas dakwaan sodomi. Pada tahun 2001, Pengadilan Tinggi mengeluarkan putusan yang mendukung vonis Anwar atas kasus korupsi. Pada Juli 2002, Anwar pun kalah di Pengadilan Federal atas kasus korupsi. Namun pada September 2004, Pengadilan Federal mencabut dakwaan sodomi terhadap Anwar dan membebaskannya dari hukuman.

Kasus sodomi jilid II Anwar terjadi pada 29 Juni 2008. Ketika itu, Mohd Saiful Bukhari Azlan, mantan asisten Anwar, melaporkan Anwar ke polisi karena telah menyodominya.

Di Malaysia, tindak sodomi meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, bisa dikenai hukuman maksimum 20 tahun penjara dan cambuk.

Sejak awal kasus sodomi jilid II ini mencuat, Anwar bersikeras dirinya hanyalah korban rekayasa politik yang dilakukan pemerintah Malaysia. Menurut Anwar, dirinya dijadikan target sebagai upaya pemerintah untuk menghentikan kebangkitan partai oposisi pimpinannya.

Hari ini, 9 Januari 2012, Anwar bisa menarik nafas lega karena Pengadilan Tinggi Malaysia menyatakan dirinya tidak bersalah atas dakwaan sodomi tersebut. “Terima kasih Tuhan, keadilan telah ditegakkan,” kata politikus senior itu kepada para wartawan seperti dilansir kantor berita AFP, Senin (9/1/2012). Bagaimana sepak terjang Anwar setelah kebebasannya ini? Hampir pasti, ia sangat menarik perhatian publik.

Puak Melayu di Malaysia pasca Mahathir cenderung retak. Publik Malaysia belum lupa bahwa bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad pernah mengumbar kemarahannya dan menuding petinggi partai utama koalisi, UMNO (Organisasi Nasional Melayu Bersatu), PM Najib Razak, tak becus memajukan partai.

UMNO kini, tuding Mahathir, tak membuat satu pun kebijakan yang efektif sejak pemilu 2008, sehingga lemah dan tidak punya kader potensial untuk kejayaan partai. Padahal,

Barisan Nasional dimana UMNO berhimpun, kehilangan mayoritas mutlak di parlemen, dan oposisi “naik daun” pada pemilu 2008.

Mahathir, yang dikenal sebagai sosok tuanya UMNO, tak dapat menyembunyikan kekesalannya kepada para juniornya, termasuk Razak sebagai penyebab rusaknya UMNO.

UMNO mulai lemah ketika diambil alih Tun Abdullah Badawi. Itu karena dia memprioritaskan keluarganya dan sejumlah tuduhan korupsi yang dilimpahkan kepadanya.

“Semua juga tahu kalau anaknya kerap melakukan pelanggaran hukum,” tandas Mahathir mengomentari sepak terjang penggantinya yang pertama.

“Namun, kerusakan makin parah saat kepemimpinan Najib Razak,” kata Mahathir dengan kesal.

“Awalnya saya berfikir, kerusakan UMNO akan membaik saat kepemimpinan Najib. Tapi kenyataannya, makin parah. Dia (Najib) terlalu sibuk hingga tak punya cukup waktu untuk melakukan perbaikan,” ungkap PM terlama Malaysia itu.

Ketegangan Mahathir vs Badawi

Perseteruan Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad dengan mantan orang dekatnya, Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi, memanasi pada tahun 2007. Badawi juga bersaing keras dengan Anwar. Tapi kali ini, mantan bos Badawi yakni Mahathir justru sering menyerang kelemahanannya, sementara Anwar berdiri pada posisi oposisi. Situasi ini jelas tidak menguntungkan pihak Melayu karena perpecahan para elitnya sendiri.

Mahathir, pada tahun 2007, mengungkapkan dirinya tidak akan menghentikan kritikan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi. Ungkapan Mahathir ini menepis harapan akan berakhirnya perpecahan politik yang pahit di negara Melayu itu.

Kritik Mahathir yang sangat mengganggu adalah menuding Badawi telah membalikkan sejumlah kebijakan darinya, termasuk sejumlah proyek raksasa infrastruktur seperti pembangunan jembatan ke Singapura. Mahathir berulang-ulang menuduh Badawi menjatuhkan martabat negara dengan gagal menjalankan proyek raksasa miliaran dolar yang menyambungkan Selat Johor dengan Singapura.

Bahkan koran the Strait Times Oktober tahun 2006 menyiarkan bahwa Mahathir menuduh Badawi telah menjadikan Malaysia sebagai negara polisi atau diktator. Selain itu, Mahathir juga menuduh Badawi telah melakukan praktik KKN dengan melibatkan anak dan menantunya dalam bisnis dan pemerintahan negara. Adapun menantu yang dimaksud adalah Kamaludin, yang saat ini menjadi penasihat Badawi selain sebagai pengusaha sukses.

Mahathir juga menuduh Badawi telah melarang anggota partai berkuasa UMNO (United Malays National Organization) untuk bertemu dengannya.

Tentu saja semua tuduhan tersebut dibantah, bahkan Badawi balik menuduh Mahathir melakukan KKN ketika berkuasa.

Namun berbagai tuduhan gencar Mahathir tersebut mendapat reaksi keras dari para pendukung Badawi. Para menteri di kabinet ketika itu sepenuhnya berada di belakang Badawi termasuk Wakil PM dan Menhan Malaysia, Tun Najib Razak.

Bahkan Wakil Presiden UMNO Muhyiddin Yassin dan Kepala Menteri Negara Bagian Kedah, Mahdzir Khalid meminta agar Mahathir mundur dari jabatannya sebagai penasihat di berbagai perusahaan strategis pemerintah seperti perusahaan minyak Petronas, perusahaan mobil Proton, dan Otoritas Leng-kawi Island. Sebab menurutnya ketiga posisi tersebut dahulu

diberikan Badawi kepada Mahathir, sementara kritikan tajam Mahathir terus dilancarkan kepada Badawi dan pemerintahannya.

Sebagai mantan pemimpin Malaysia yang telah berkuasa selama 22 tahun, Mahathir rupanya kecewa terhadap Badawi karena tidak meneruskan berbagai program pembangunan yang telah dicanangkannya, seperti proyek Jembatan Johor-Singapura, perusahaan mobil Proton dan sebagainya. Pada hal berbagai proyek tersebut merupakan proyek prestisius bagi Mahathir. Apalagi sebelumnya Badawi berjanji akan melanjutkan berbagai proyek tersebut.

Namun setelah berkuasa, Badawi yang semula ditunjuk Mahathir sebagai penggantinya ternyata tidak melanjutkan keinginan Mahathir. Badawi malah membatalkan sebagian proyek Mahathir seperti pembangunan Jembatan Johor. Namun alasan Badawi juga cukup logis, karena pihak Singapura menerapkan berbagai syarat yang tidak mungkin dilakukan pemerintah Malaysia, apalagi dana untuk pembangunan proyek tersebut semakin sulit didapat pemerintahnya.

Sementara proyek Proton dinilai Badawi sebagai pemborosan keuangan negara, sebab selama ini negara terus mensubsidi perusahaan mobil kebangsaan Malaysia tersebut, sementara di pasaran internasional mobil Proton kurang laku sehingga hanya “jago kandang”. Proyek mobil Proton mirip dengan proyek pabrik pembuatan pesawat terbang IPTN di era Orde Baru. Perusahaan yang beralih nama menjadi PTDI tersebut cukup membebani keuangan negara dan produknya kurang laku di pasaran internasional, sehingga terjadilah rasionalisasi besar-besaran.

Mahathir menuding beberapa pemimpin UMNO hanya tertarik pada prestise jabatan dan uang. Banyak juga elite UMNO yang hanya berkeinginan untuk mengikuti pemilihan, tapi tidak peduli dengan partai.

Dengan melemahnya UMNO, para analis politik Malaysia melihat Anwar Ibrahim punya prospek menang dalam pemilu mendatang.

Anwar adalah salah satu bintang politik Asia yang karirnya cepat berkembang. Ia juga tokoh reformasi populer di Malaysia. Wajahnya pernah menjadi sampul majalah Time pada 1997 sebagai “Masa Depan Asia”. Sebagai aktivis Muslim, ia mulai dikenal publik pada 1970-an sebagai mahasiswa radikal.

Anwar lahir pada 10 Agustus 1947 di Pulau Penang Utara. Ia anak dari buruh rumah sakit. Ia belajar di salah satu sekolah top Malaysia. Namanya terkenal sebagai aktivis pemimpin remaja Islam. Karena beberapa tindakannya, ia pernah dipenjara. Namanya pun dilambungkan oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad.

Pada 1974, ia sempat dipenjara selama 20 bulan oleh Gerakan Keamanan Internal Malaysia karena memimpin demonstrasi anti pemerintahan melawan kemiskinan di utara. Kemudian, Mahathir mengajaknya bergabung dengan Organisasi Nasional Malaysia, partai pemerintah utama, pada 1982. Ia diajak untuk menjembatani rentang antara gambaran partai Malaysia yang nasionalis dan aspirasi Islam yang sedang berkembang. Di bawah Mahathir, Anwar berkembang pesat. Ia pernah menjabat berbagai posisi, seperti kementerian pertanian dan pendidikan dan menteri keuangan sejak 1991.

Anwar pernah ditunjuk untuk menggantikan Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Pada 1993, ia pun diangkat menjadi wakil perdana menteri. Ketika tengah menjabat, ia merasa korupsi telah mengakar dalam politik dan bisnis Malaysia. Oleh karena itu, ia melakukan kampanye anti korupsi, kolusi, dan nepotisme pada 1998.

Mahathir terlihat tidak setuju dengan tindakannya itu. Ia pun dicopot dari jabatannya sebagai wakil perdana menteri dan menteri keuangan. Anwar juga dituduh melakukan sodomi dan korupsi. Tuduhan yang dapat menghentikan masa jayanya itu dirasa Anwar sebagai cara untuk menghentikan kampanye reformasinya. Ia kemudian masuk penjara karena tuduhan korupsi dan sodomi. Penjara tak membuatnya jera untuk berpolitik.

Setelah kasus sodominya dicabut pengadilan pada 2004, ia segera kembali ke dunia politik sebagai kepala oposisi multi-etnik dan revitalisasi yang berpusat di kalangan tokoh reformasi sosial sekuler dan Islam. Ia pun menunjukkan kekuatannya di pemilu 2008 dengan nyaris mengalahkan Barisan Nasional yang sedang berkuasa.

Hal itu menempatkan koalisi tiga partai Anwar menguasai sepertiga kursi di parlemen. Ia pun memberikan tantangan pada pemerintah yang sekarang dipimpin oleh Najib Razak.

Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim yakin pemilu mendatang merupakan masa berakhirnya kekuasaan pemerintahan Barisan Nasional (BN), dan era dimulainya demokrasi di negeri jiran itu.

Anwar menyampaikan keyakinannya bahwa Pakatan Rakyat (PR) akan merebut suara dari BN yang lima dekade berkuasa di Malaysia.

“Dengan kemajuan sekarang ini, kami yakin dapat mengambil alih pemerintahan,” cetus Anwar.

Lalu Anwar menyatakan, demonstrasi besar-besaran pada 9 Juli 2011 lalu, yang menuntut adanya pemilu yang bersih, adalah bentuk dukungan masyarakat pada Pakatan Rakyat. Anwar yakin oposisi memenangkan lebih dari 40 persen suara di wilayah BN, Johor dan Pahang, serta merebut kembali suara di lima negara bagian seperti yang pernah dimenangkan pada 2008, dan mendapatkan penambahan dukungan di Negeri Sembilan dan Terengganu.

Anwar juga meyakini dampak revolusi di negara-negara Arab belakangan ini atas rakyat Malaysia, yang menumbangkan penguasa diktator.

“Pergolakan Timur Tengah telah menumbangkan penguasa otokrasi. Di Singapura, suara oposisi meningkat dalam pemilu Mei, dan Myanmar membebaskan beberapa saingan politik bulan lalu. Kami akan menang di Malaysia sebagai dampak perubahan dunia itu,” Anwar mencontohkan.

Lantas, kapan kebangkitan revolusi Malaysia terjadi? “Pada pemilihan umum nanti lah jawabannya,” ujar Anwar seraya memprediksi potensi kemenangannya dalam pemilu sekitar akhir Desember 2012 hingga Maret 2013. Inikah jalan kemenangan yang diramalkannya? Boleh jadi demikian.

Dimensi Etnis dan Ketimpangan Ekonomi

Sebagaimana dicatat Prof. Wang Gungwu, posisi istimewa etnis China di Malaysia sebenarnya warisan zaman kolonial. Keturunan China diberi keleluasaan dalam bidang perdagangan dan pertambangan sebagai bagian politik untuk menyudutkan kaum Melayu. Meskipun sudah merdeka tahun 1957, pola hubungan seperti di zaman penjajahan tidak berubah, kecuali pelakunya bergeser, karena tetap terjadi kolusi antara penguasa (politisi Melayu) dan pengusaha, yang kebanyakan keturunan China. Kesenjangan ekonomi pun meruak dan menimbulkan kerawanan sosial, yang akhirnya meletus dalam kerusuhan etnis tahun 1969.¹⁶

Sampai sejauh ini, konfigurasi hubungan sosial di Malaysia yang bersifat pluralis masih kurang harmonis karena persoalan ketimpangan kemajuan ekonomi. Data statistik

yang dipaparkan organisasi politik terbesar puak Melayu, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), mengungkapkan penghasilan warga etnis China rata-rata dua kali lebih besar ketimbang pendapatan warga Melayu. Menurut data yang disampaikan UMNO sehari menjelang pembukaan sidang tahunan 15 November 2006, etnis China mendominasi dua pertiga kegiatan bisnis meski puak Melayu mencakup 60 persen dari total 26 juta penduduk negeri itu. Etnis Melayu hanya menguasai 11,7 persen kegiatan bisnis, sementara etnis China 71 persen. Data ini menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan menyulut kebencian sosial. Meski data itu oleh pihak UMNO tidak dimaksudkan untuk meresahkan etnis China yang meliputi 25 persen penduduk, atau keturunan India yang mencakup 10 persen penduduk, dalam kenyataannya kekhawatiran dan kegelisahan etnis China Malaysia tetap merebak.

Data statistik itu sendiri oleh UMNO sengaja diangkat untuk tujuan perbaikan ekonomi bumiputra. Apalagi ada penilaian bahwa, tidak ada gunanya menyembunyikan data kesenjangan ekonomi etnis China dan puak Melayu di tengah era keterbukaan Malaysia sekarang ini. Persoalan kesenjangan termasuk kasatmata dan merupakan isu laten. UMNO nampaknya sengaja menyingkapkan data kesenjangan ekonomi untuk mempertahankan Kebijakan Ekonomi Baru (New Economic Policy atau NEP) yang dilakukan Malaysia setelah kerusuhan rasial tahun 1969, yang menewaskan ratusan orang.

Kebijakan itu bertujuan membantu puak Melayu meraih kemajuan agar tidak tertinggal dibandingkan dengan golongan etnis China. Hanya saja, sebagai evaluasi, puak Melayu tetap saja tertinggal meski NEP sudah dilaksanakan bertahun-tahun.

Dalam konteks ini, perselisihan Mahathir dan Badawi sesungguhnya mengkonfirmasi "konflik kepentingan" elite kuasa di Malaysia yang bersifat laten, sekaligus merefleksikan postpower syndrome Mahathir sendiri. Apalagi Mahathir merasa usahanya mengangkat ekonomi puak Melayu belum sepenuhnya berhasil, namun di tangan Badawi, usaha itu (New Economic Policy atau NEP) ternyata untuk sebagian telah ditinjau kembali, bahkan dirubah lagi karena konteks masalah dan tantangan ekonomi-politik dan globalisasi yang berpusar di luar kendali.

Isu Sodomi dan Wikileaks

Dalam memo diplomatik Amerika Serikat (AS) yang bocor di WikiLeaks terungkap adanya komunikasi antara pihak intelijen Singapura dan Australia mengenai masalah sodomi yang menjerat Anwar Ibrahim, mantan deputi perdana menteri yang kini menjadi pemimpin oposisi di Malaysia. Kuasa hukum Anwar pun berang.

Tim pengacara Anwar Ibrahim mengajukan protes ke pengadilan berkait munculnya pemberitaan di media Australia mengenai informasi, yang diklaim berasal dari memo yang dibocorkan WikiLeaks. Informasi itu tentang penilaian intelijen Singapura yang mempercayai bahwa mantan deputi PM Malaysia itu benar terlibat kasus sodomi.

Pengacara Anwar, Sankara Nair, seperti diberitakan laman harian New Straits Times, Selasa, 14 Desember 2010, menyatakan, pemberitaan media massa atas informasi yang belum dipastikan kebenarannya itu, bersifat spekulatif dan bisa menyesatkan publik serta mengganggu proses peradilan.

Pengacara Anwar menegaskan laporan-laporan itu bersifat spekulatif dan bisa menjatuhkan nama baik kliennya yang belum diputuskan pengadilan apakah bersalah atau tidak atas kasus yang menjeratnya.

“Menurut penelusuran kolega-kolega dan sumber kami, tidak ada kabar seperti itu di laman WikiLeaks maupun di Sun Herald, yang dikabarkan sebagai media pertama yang memberitakan informasi itu, semuanya spekulatif” demikian kata Sankara.

Pemberitaan isu sodomi itu jelas memberikan angin segar kepada kubu PM Najib Razak, untuk menyudutkan Anwar sebagai pesaing politiknya ke posisi yang sulit dan terpojok. Di Malaysia isu sodomi amat sensitif dan sangat merugikan Anwar karena merupakan pembunuhan karakter yang mematikan.

“Ini pembunuhan karakter bagi Anwar, dan pemberitaan spekulatif itu hanya menguntungkan kubu Najib Razak di Barisan Nasional,” kata M Chozin Amirullah MA, Ketua Umum PB HMI pada 2010 sewaktu baru kembali dari Kuala Lumpur atas undangan kubu Nurul Izzah Anwar Ibrahim.

Akademisi Farish A Noor, peneliti senior di Universitas Nanyang Singapura telah lama menegaskan memang ada beberapa elemen yang bisa membuat orang curiga, bahwa tuduhan sodomi merupakan manipulasi politik.

Sama seperti tuduhan atas Anwar sepuluh tahun lalu, banyak pihak di Malaysia, terutama para pendukung Anwar, yang menganggap ini adalah salah satu cara menjatuhkan Anwar secara personal.

Bedanya, kali ini masyarakat Malaysia sudah mulai sinis dengan situasi politik saat ini, dan memang sudah tercipta situasi ‘fatigue of politics’ atau kelelahan politik. Ini disebabkan masyarakat yang hampir setiap minggu dihadapkan pada skandal-skandal para politisi yang sifatnya personal, termasuk isu skandal Najib Razak dengan perempuan penghibur keturunan Mongolia.

Hal ini merupakan satu sindrom politik di Malaysia yang bergeser ke arah personal, yaitu lebih menyorot kehidupan atau isu-isu individu para tokoh-nya, ketimbang mengedepankan isu-isu lebih penting seperti keadilan, pemerataan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat.

Anwar dan Pemilu Malaysia 2008

Pada 8 Maret 2008, Malaysia mengadakan pemilihan umum. Jadwal dipercepat karena pemerintah menghadapi banyak masalah. Pemilu KE-12 di Malaysia ini diikuti 10,9 juta pemilih, termasuk 700 ribu pemilih baru dari 26 juta penduduk.

Seluruh partai politik (parpol) memperebutkan 222 kursi parlemen dan 505 kursi DUN (DPRD), kecuali di Sarawak. Sejak kemerdekaan tahun 1957, koalisi Barisan Nasional selalu memenangi pemilu.

Dalam pemilu ini akan bertanding dua kubu, yakni Barisan Nasional (BN) yang dimotori UMNO (United Malays National Organization), MCA (Malaysian Chinese Association), dan MIC (Malaysian Indian Congress) melawan Barisan Alternatif yang dimotori PKR (Partai Keadilan Rakyat), PAS (Pan Malaysian Islamic Party atau Partai Islam Se-Malaysia), dan DAP (Democratic Action Party).

Tapi, Barisan Nasional dan media massa pro-pemerintah selalu memberikan label kepada oposisi sebagai barisan pembangkang, sedangkan oposisi memilih nama barisannya sebagai Barisan Alternatif. Parpol yang menjadi motor di BN adalah partai yang keanggotaannya berdasarkan ras, seperti partai berdasarkan ras Melayu, Cina, dan India. Di barisan alternatif hanya PAS yang merupakan partai ras, yakni Partai Islam. PKR dan DAP merupakan parpol multiras.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malaysia Abdul Rashid Abdul Rahman menyatakan pengumuman kandidat wakil rakyat pada 24 Februari. Selanjutnya, kandidat bisa memulai kampanye pemilihan secara resmi untuk memperebutkan 222 kursi parlemen.

Para akademisi dan aktivis UMNO di Kuala Lumpur dalam surat elektronik kepada penulis mengakui PM Malaysia dan Barisan Nasional (koalisi parpol yang dimotori UMNO, MCA, dan MIC) sengaja mempercepat pemilu paling lambat Maret 2008. Ini untuk mencegah Anwar Ibrahim ambil bagian. Alasan itu merujuk pada tokoh oposisi Anwar Ibrahim, mantan Wakil PM Malaysia dan mantan wakil presiden UMNO, yang segera bisa berpolitik mulai April 2008.

Anwar Ibrahim dibebaskan dari penjara ketika Datuk Abdulah Badawi menjabat perdana menteri. Tapi, pengadilan memutuskan ia dilarang berpolitik hingga Maret 2008. Itulah sebabnya, banyak pula pihak yang menduga keputusan Pemerintah Malaysia mempercepat pemilu 8 Maret itu untuk menutup peluang Anwar Ibrahim ikut bersaing dalam pemilu.

Ada juga pandangan aktivis UMNO bahwa pemilu Malaysia sengaja dipercepat karena banyaknya masalah yang dihadapi pemerintah. Yang utama maraknya perselisihan berbasis etnis. Di antaranya, perselisihan antar-kelompok etnis Muslim Melayu dengan etnis minoritas Tionghoa dan India.

Perselisihan itu merebak karena etnis minoritas tidak puas dengan pemerintahan yang didominasi politisi etnis Melayu. Dalam beberapa bulan terakhir Pemerintahan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi diwarnai berbagai aksi demonstrasi.

Pemicunya, tuntutan reformasi terhadap pemilu, anggapan diskriminasi dari etnis India, serta melambungnya harga bahan bakar dan makanan. Meski demikian, Badawi tetap optimistis pemerintahannya dapat memperoleh kemenangan mutlak di Negara Bagian Kelantan. "Tetap ada harapan untuk menang. Itu pasti. Kami punya dukungan kuat di wilayah itu," katanya belum lama ini.

Para analis menilai kebijakan Badawi mengelat pemilu lebih awal itu sebagai antisipasi melonjaknya harga barang menyusul dicabutnya subsidi bahan bakar. Kritik serupa dilontarkan Anwar Ibrahim yang kini bermukim di Hong Kong. Pak Lah, sapaan akrab Badawi, dinilai Anwar sangat kerepotan. Apalagi, dukungan terhadap Pak Lah terus menurun.

Malaysia begitu terpuuk oleh kenaikan harga barang, tindak kriminal yang menjadi-jadi, korupsi di berbagai tempat, dan ketegangan antaretnis. "Sementara lama Barisan Nasional menanggukuhkan pemilu, mereka bisa semakin kehilangan banyak dukungan dalam pemilu," kata Anwar.

Masa empat tahun Pemerintahan Badawi cukup menjemukan, mengecewakan, dan diwarnai banyak kegagalan. Sejak memenangi Pemilu 2004, koalisi yang dipimpin Badawi mendapatkan 90 persen dukungan di parlemen.

Tapi, Badawi tak henti menuai berbagai kritik pedas. Di antaranya, ia dianggap lemah dan tidak bisa mewujudkan janji yang diucapkan saat kampanye, yaitu memberantas korupsi dari bumi Malaysia di bidang bisnis maupun politik.

Sejauh ini konfigurasi hubungan sosial di Malaysia yang bersifat pluralis masih terasa kurang harmonis karena persoalan ketimpangan kemajuan ekonomi. Data statistik yang dipaparkan organisasi politik terbesar puak Melayu, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), mengungkapkan bahwa sejak kerusuhan etnis 1969, disusul berlakunya New Economic Policy (NEP) untuk memberdayakan ekonomi puak Melayu, penghasilan warga etnis China rata-rata dua kali lebih besar ketimbang pendapatan warga Melayu. Etnis Cina

sampai 2008 ini tetap mendominasi dua pertiga kegiatan bisnis meski puak Melayu mencakup 60 persen dari total 26 juta penduduk negeri itu.

Etnis Melayu hanya menguasai 11,7 persen kegiatan bisnis, sedangkan etnis Cina 71 persen. Bahkan, pada 2005 Malaysia mencatat kesenjangan paling tajam di Asia Tenggara. Kondisinya di belakang Indonesia dan Thailand. Mengikuti ukuran nisbah Gini (Gini coefficient), ukuran yang digunakan untuk mengukur ketidakmerataan pendapatan, Malaysia berada pada 0,47.17

Bercermin pada data Bank Dunia, jurang pendapatan individu di Malaysia kedua terburuk di Asia. Meminjam studi Anwar Ibrahim, hanya Papua New Guinea yang lebih buruk dari Malaysia. Dari 127 negara, Malaysia berada di urutan KE-101 dari segi indeks Gini.

Anwar mengingatkan bahwa selama krisis moneter 1997-1998, kalangan menengah ke bawah di Malaysia dikorbankan oleh pemerintah untuk menopang ekonomi lapisan atas. Paparan itu tidaklah dimaksudkan menggelisahkan etnis Cina yang meliputi 25 persen penduduk atau keturunan India yang mencakup 10 persen penduduk.

Pembelahan etnis di Malaysia dinilai para analis jauh lebih tajam dan mengkhawatirkan dibandingkan di Indonesia. Gerakan politik etnis oleh etnis India dan Cina dalam bentuk protes dan demo makin menegaskan betapa politik etnis di Malaysia kian menajam karena kurang terakomodasi ke dalam sistem yang ada.

Revitalisasi politik inklusif tampaknya gagal dilakukan Badawi kepada kaum minoritas India dan Cina untuk meredakan suhu politik antaretnis yang membelah Malaysia itu agar arang tidak jadi abu.

Menghambat Anwar Ibrahim Berpolitik

Pemilu Malaysia yang dipercepat, cukup mengejutkan publik domestik dan internasional. Pada 8 Maret 2008 Malaysia mengadakan pemilu. Jadwal dipercepat karena pemerintah menghadapi banyak masalah. Pemilu KE-12 di Malaysia itu diikuti 10,9 juta pemilih, termasuk 700.000 pemilih baru di antara 26 juta penduduk. Seluruh partai politik akan memperebutkan 222 kursi parlemen dan 505 kursi DUN (DPRD), kecuali di Sarawak. Sejak kemerdekaan pada 1957, koalisi Barisan Nasional selalu memenangi pemilu.

Dalam pemilu itu bertanding dua kubu, yakni Barisan Nasional (BN) yang dimotori UMNO (United Malaysia National Organization), MCA (Malaysian Chinese Association), dan MIC (Malaysian Indian Congress) melawan Barisan Alternatif yang dimotori PKR (Partai Keadilan Rakyat), PAS (Pan Malay-sian Islamic Party atau Partai Islam se-Malaysia), dan DAP (Democratic Action Party).

Tapi, BN dan media massa pro pemerintah selalu memberikan label kepada oposisi sebagai pembangkang, sedangkan oposisi memilih nama barisannya sebagai Barisan Alternatif.

Parpol yang menjadi motor di BN adalah partai yang keanggotaannya berdasarkan ras, seperti ras Melayu, Tionghoa, dan India. Sedangkan di barisan alternatif hanya PAS yang merupakan partai ras, yakni partai Islam.

Sedangkan PKR dan DAP merupakan parpol multiras. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malaysia Abdul Rashid Abdul Rahman menyatakan, pengumuman para kandidat wakil rakyat pada 24 Februari. Selanjutnya, kandidat bisa memulai kampanye pemilihan secara resmi untuk memperebutkan 222 kursi parlemen

Para akademisi dan aktivis UMNO di Kuala Lumpur dalam surat elektroniknya kepada penulis mengakui, PM Malaysia dan Barisan Nasional (koalisi parpol yang dimotori UMNO, MCA, dan MIC) sengaja mempercepat pemilu paling lambat Maret 2008.

Alasannya, untuk mencegah Anwar Ibrahim ambil bagian. Alasan itu merujuk pada tokoh oposisi Anwar Ibrahim, mantan wakil PM Malaysia dan mantan wakil presiden UMNO, yang segera bisa berpolitik April 2008.

Anwar Ibrahim dibebaskan dari penjara ketika Datuk Abdullah Badawi menjabat perdana menteri. Tapi, pengadilan memutuskan dia dilarang berpolitik hingga Maret 2008. Itulah sebabnya, banyak pihak yang menduga bahwa keputusan pemerintah Malaysia mempercepat pemilu 8 Maret itu untuk menutup peluang Anwar Ibrahim ikut bersaing dalam pemilu.

Ada juga pandangan aktivis UMNO lainnya, bahwa pemilu Malaysia sengaja dipercepat karena banyaknya masalah yang dihadapi pemerintah. Yang utama, maraknya perselisihan berbasis etnis. Misalnya, perselisihan antar-etnis muslim Melayu dengan etnis minoritas Tionghoa dan India. Perselisihan itu merebak karena etnis minoritas tidak puas terhadap pemerintahan yang didominasi politisi etnis Melayu.

Memang, dalam beberapa bulan terakhir, pemerintahan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi diwarnai berbagai aksi demonstrasi. Pemicunya, tuntutan reformasi terhadap pemilu, anggapan diskriminasi dari etnis India, serta melambungnya harga bahan bakar dan makanan.

Meski demikian, Badawi tetap optimistis bahwa pemerintahannya dapat memperoleh kemenangan mutlak di Negara Bagian Kelantan. “Tetap ada harapan untuk menang. Itu pasti. Kami punya dukungan kuat di wilayah itu,” katanya belum lama ini.

Para analis menilai, kebijakan Badawi mengelat pemilu lebih awal itu sebagai antisipasi melonjaknya harga barang menyusul dicabutnya subsidi bahan bakar. Malaysia begitu terpukul oleh kenaikan harga barang, tindak kriminal yang menjadi-jadi, korupsi di berbagai tempat, dan ketegangan antaretnis. “Semakin lama Barisan Nasional menanggguhkan pemilu mereka bisa semakin kehilangan banyak dukungan dalam pemilu,” kata Anwar.

Masa empat tahun pemerintahan Badawi cukup menjemukan, mengecewakan, dan diwarnai banyak kegagalan. Sejak memenangi Pemilu 2004, koalisi yang dipimpin Badawi mendapatkan 90 persen dukungan di parlemen. Tapi, pemerintahan Badawi tak henti menuai berbagai kritik pedas. Di antaranya, dia dianggap lemah dan tidak bisa mewujudkan janji yang diucapkan saat kampanye, yaitu memberantas korupsi dari bumi Malaysia di bidang bisnis maupun politik.

Hingga kini, konfigurasi hubungan sosial di Malaysia yang bersifat pluralis masih terasa kurang harmonis karena persoalan ketimpangan kemajuan ekonomi.

Bahkan, pada 2005, sebagaimana diuraikan di atas, Malaysia mencatat kesenjangan paling tajam di Asia Tenggara di belakang Indonesia dan Thailand. Mengikuti ukuran nisbah Gini (Gini coefficient), ukuran yang digunakan untuk mengukur ketidakmerataan pendapatan, Malaysia berada pada 0,47. Bercermin pada data Bank Dunia, jurang pendapatan individu di Malaysia adalah kedua paling buruk di Asia.

Gerakan politik etnis oleh etnis India dan Tionghoa dalam bentuk protes dan demo makin menegaskan betapa politik etnis di Malaysia kian tajam karena kurang terakomodasi ke dalam sistem politik. Di sini, revitalisasi “politik inklusif” harus dilakukan Badawi kepada kaum minoritas India dan Tionghoa untuk meredakan suhu politik antaretnis yang membelah Malaysia itu agar “arang tidak menjadi abu”.

Hasil Pemilu Malaysia 8 April 2008 menaikkan jumlah kursi oposisi dari 20 menjadi 82 kursi di parlemen dari 222 kursi yang diperebutkan. Bukan itu saja hasilnya, lima negara bagian dikuasai oleh oposisi yakni Selangor, Pinang, Kelantan, Kedah dan Perak ditambah Kuala Lumpur sebagai ibukota Malaysia dan wilayah persekutuan.

Hasil Pemilu 2008 menimbulkan konflik internal UMNO. Mantan PM Malaysia Mahathir dan anaknya Mukhriz Mahathir memprotes keras atas kekalahan itu dan menimpakan kesalahan kepada Abdullah Badawi selaku presiden UMNO dan BN. Ujungnya, Mahathir keluar dari UMNO sebagai kekecewaan Badawi tidak mau mundur.

Parpol koalisi BN makin kecewa setelah diumumkan kabinet baru. Parpol koalisi BN dari Timur Malaysia, Sabah dan Sarawak, yang memberikan kontribusi besar dan menyelamatkan BN pada Pemilu 2008 ini tidak diakomodasi yang proporsional dalam kabinet. Akibatnya, beberapa kader Parpol dari Timur Malaysia menolak jabatan wakil menteri setelah PM Badawi mengumumkan kabinet barunya.

Anwar Ibrahim dan oposisi melihat peluang ini. Pendekatan dilakukan. Oposisi optimis mampu menarik 31 anggota parlemen BN dari Timur Malaysia menyeberang ke oposisi. Jika waktu itu ada 31 anggota parlemen menyeberang ke oposisi maka pemerintahan BN bisa jatuh dan otomatis oposisi dapat bentuk pemerintahan baru. Apalagi beberapa Parpol koalisi BN di Timur Malaysia dulunya merupakan Parpol oposisi.

Penampilan kubu oposisi pimpinan Anwar telah memukul moral Barisan Nasional, ditandai dengan naiknya kursi oposisi di parlemen. Barisan Alternatif pimpinan Anwar meyakini pemilu tahun mendatang bakal menang jika pemilu bersih dan adil. Dan itu bukan mustahil.

Isu SARA dan Solusi

Malaysia adalah salah satu contoh negara yang berhasil mengembangkan politik identitasnya. Setiap etnisnya mempunyai ruang yang cukup untuk mengembangkan dan memperkuat identitas kelompoknya. Namun, keberhasilan dalam mengembangkan politik identitas tersebut kurang diimbangi dengan pembangunan kesadaran nasionalisme sehingga keberhasilan mengembangkan politik identitas dalam jangka panjang dapat menjadi ancaman terhadap keberlangsungan Malaysia sebagai nation-state.¹⁸ Apalagi globalisasi cenderung menggerus nation-state dengan lalu lintas modal, manusia, teknologi dan informasi, barang dan jasa yang begitu cepat dan masif.

Bagaimanapun, menguatnya politik identitas di Malaysia merupakan ancaman terhadap keberlangsungan demokrasi di negara tersebut. Hal tersebut terjadi karena politik identitas tidak dikembangkan dalam bingkai nation state. Setiap etnis di Malaysia selalu berjuang untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Mereka enggan untuk membuka ruang-ruang komunikasi dengan pihak lain.

Kondisi tersebut, terjadi karena politik identitas di Malaysia dikembangkan dalam bingkai etnis, bahasa, dan agama, bukan dalam bingkai Malaysia sebagai sebuah negara.¹⁹ Di Malaysia etnis Melayu yang Muslim mendominasi pemerintahan, sementara etnis China dan India menjadi lapis kedua dan ketiga, dengan peran politik masing-masing yang sepadan, namun dalam bidang ekonomi, ras Cina relatif dominan. Ketegangan sosial masih kuat dirasakan oleh masyarakat karena masing-masing kelompok (Melayu, Cina dan India) masih mengalami sekat-sekat pemisah dan saling memperkuat identitas di tengah globalisme yang makin keras.

Farish A Noor melihat kaum elite Malaysia sangat sadar bahwa politik identitas yang berkembang saat ini sangat berbahaya terhadap keberlangsungan Malaysia sebagai nation state. Bahwa untuk menghindari dampak buruk dari politik identitas yang berkembang saat ini, masyarakat Malaysia harus segera merumuskan identitas nasionalnya. Saat ini yang harus dilakukan oleh masyarakat Malaysia adalah merumuskan identitas nasional yang bisa di-share

dan menjadi kebanggaan semua masyarakat Malaysia tanpa dibatasi oleh etnis, bahasa, dan agama.

Politik identitas itu telah menghantam keutuhan dan integrasi nasional di Malaysia. Sebagai ilustrasi, pada 2010 misalnya, Malaysia muncul kembali dalam berita utama yang negatif di media internasional untuk alasan yang salah. Selama dua minggu berturut-turut tahun 2010 itu, pelaku pembakaran dan pengacau bernuansa SARA (suku, agama, ras, antargolongan) menyerang 10 tempat ibadah, termasuk gereja-gereja Kristen dan kuil Sikh. Meskipun tidak ada orang cedera dan kerusakan material diperbaiki, tetap saja terasa adanya luka emosional dan psikologis yang menganga. Setelah banyak pernyataan yang saling bertentangan dari pejabat pemerintah, penyebab kekerasan masih belum terselesaikan. Akibatnya, reputasi Malaysia sebagai bangsa berdamai dengan keragaman etnis dan agama dipertaruhkan.

Mengenai politik identitas golongan Muslim, akademisi Norani Othman dari Universiti Kebangsaan Malaysia, melihat adanya kompatibilitas Islamisasi dan demokratisasi di Malaysia dalam konteks regional dan global. Sayangnya, agenda Islamisasi ini lebih dijuruskan pada tujuan politik. Islamisasi digunakan pemerintah untuk memperkuat kekuasaan mereka dengan politik identitas berbasis agama. Dengan adanya dualisasi hukum, satu untuk kaum muslim dan satu lagi untuk non-muslim, banyak kasus hak asasi manusia (HAM) yang tak terselesaikan karena terjepit di antara kedua sistem hukum. Dan buntutnya kasus-kasus ini justru menguntungkan pemerintah otoritarian Malaysia.

Menghadapi kerusuhan SARA ini, Anwar menyatakan pihaknya telah meminta perhatian terhadap kebutuhan yang lebih luas di dunia Muslim bagi kepemimpinan yang penuh konsistensi dan kredibilitas dalam mewujudkan keadilan, keadilan dan pluralisme. Nilai-nilai ini tertanam dalam tradisi Islam sebagai tujuan yang lebih tinggi dari Syariah diuraikan oleh ahli hukum abad KE-12 al-Shatibi.

Anwar juga melihat cara-cara kotor yang digunakan dalam teknik-teknik propaganda bagi para pembakar kerusuhan SARA, ketika mana para politisi dan para demagog mengeksploitasi sentimen publik untuk menggali dukungan dengan mengobarkan rasa takut.

Taktik pengalihan isu tersebut dieksploitasi untuk mengalihkan perhatian publik atas skandal memalukan: mulai dari keputusan pengadilan yang kontroversial, tuduhan komisi selangit yang diekstrak dari pengadaan alutsista militer, pencurian dua mesin jet dari inventarisasi Royal Air Force Malaysia dan isu selingkuh seks elite.

Perilaku ini telah memburuk sejak partai yang berkuasa kehilangan dua pertiga mayoritas diparlemen tahun lalu. UMNO sekarang sangat berjuang untuk mendapatkan kembali dukungan publik.

Anwar mengakui, “Kita telah melihat umat Islam di seluruh dunia protes terhadap hukum diskriminatif yang disahkan di negara-negara liberal dan progresif di Barat. Namun sama seperti Perancis dan Jerman yang memiliki masalah mereka dengan burqa dan Swiss dengan menara adzannya, demikian juga Malaysia, terbukti sering gagal untuk menawarkan lingkungan yang aman dan damai dalam mengakomodasi masyarakat minoritas.”

Serangan dan pembakaran terakhir menunjukkan apa yang salah dengan cara warga Muslim Malaysia dalam memperlakukan warga non-Muslim. Serangan itu diprovokasi oleh kontroversi atas penggunaan kata “Allah” oleh komunitas Kristen Malaysia, yang berjumlah lebih dari dua juta, atau sekitar 10% dari populasi.

Pada akhir 2007, Kementerian Dalam Negeri melarang penggunaan kata Allah oleh Herald, sebuah surat kabar Katolik, dan kemudian menyita

15.000 salinan dari Alkitab berbahasa Melayu yang diimpor dari Indonesia di mana kata untuk Tuhan diterjemahkan sebagai “Allah.”

Pada 31 Desember 2009, sebuah putusan oleh Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur yang membatalkan larangan sebelumnya, menegaskan jaminan konstitusional tentang kebebasan beragama di Malaysia. Sejak itu, situasi yang sudah tegang memuncak, terutama karena hasutan oleh beberapa politisi sembrono, media mainstream dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang memiliki hubungan keanggotaan dan kepemimpinan dengan UMNO, partai yang berkuasa. Sebagai contoh, koran Utusan Malaysia, harian terbesar berbahasa Melayu, harian yang juga dimiliki oleh UMNO, memiliki sentimen Islamisme dengan menuduh non-Muslim menodai nama “Allah” dan menuduh konspirasi Kristen untuk menguasai Malaysia yang didominasi Muslim melalui konversi.

Sudah meluas keraguan publik atas pemerintahan Najib Razak, masyarakat juga prihatin atas hak asasi manusia, supremasi hukum dan korupsi yang merajalela; Indeks Persepsi Korupsi Transparency International Malaysia turun 10 poin pada 2009, serta menunjukkan indeks terburuk dalam lebih dari 15 tahun. Visi Malaysia sebagai lokasi yang damai dan stabil untuk investasi, pariwisata dan migrasi sekarang dalam bahaya.

Menghadapai berbagai kompleksitas persoalan itu, tokoh oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim menyatakan bahwa Malaysia telah disandera oleh kepentingan-kepentingan tertentu dari beberapa kelompok elite yang memani-pulasi iman dan identitas sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan politik dan ekonomi. Ini adalah politik lama, dan telah menjadi jelas bahwa mereka yang memprovokasi kebencian hanya melakukannya untuk memperpanjang monopoli kekuasaan mereka. Anwar yakin mayoritas warga Malaysia menolak pendekatan ini.

Situasi ini menjadi sangat penting untuk Malaysia yang harus bersaing dengan lanskap sosial dan politik yang semakin terpolarisasi. Apalagi pemilu bersih belum terlaksana karena pemerintah Najib Razak takut kalah sehingga dicurigai menghalalkan segala cara. Politik yang kotor itu telah mendorong kubu Anwar berdemonstrasi besar. Sehingga pada tahun 2011, kubu anwar bergerak kejalanan dengan seruan Pemilu bersih. Ini adalah tahun pertarungan politik jalanan. Unjuk rasa puluhan ribu warga Malaysia menuntut proses reformasi pemilu tahun itu, berakhir ricuh, Sabtu (9/8/2011).

Pihak berwenang Malaysia mengambil langkah-langkah keamanan yang luar biasa untuk mencegah pengunjuk rasa menguasai ibukota. Aparat menutup sejumlah ruas jalan di Malaysia, menutup stasiun kereta api dan memblokir jalan dengan truk sekaligus menyiramkan gas air mata ke para demonstran dekat Stadion Independence di pusat kota Kuala Lumpur. Di lokasi ini para aktivis reformis di bawah koordinasi kaum oposisi berusaha untuk berkumpul. Namun demikian, ribuan berusaha untuk mencapai stadion dari berbagai bagian Kuala Lumpur, meneriakan “Hidup rakyat” dan membawa balon kuning dan bunga saat berjalan.

Aksi politik ini memiliki pengaruh domestik yang krusial. Sebagai pemimpin oposisi, Anwar Ibrahim mengatakan di Twitter bahwa ia menderita “cedera” ketika kelompoknya terkena gas air mata. Situs berita Malaysia kini mengatakan Anwar punya luka di kepalanya dan cedera lutut. Dalam akun twitter-nya @anwaribrahim, Anwar menuliskan jika anak-anaknya yakni Nurul Izzah dan N Hana (putri bungsunya) ikut ditangkap dalam aksi unjuk rasa terbesar di Malaysia itu. Sebelum dilakukan penangkapan terakhir itu, sekitar 230 orang ditahan sejak 25 Juni termasuk enam orang berdasarkan undang-undang keamanan yang keras yang mengizinkan penahanan tanpa diadili.

Dalam merespon kompleksitas kemelut sosial ini, Anwar meyakini bahwa masyarakat warga (civil society) di Malaysia menyadari bahwa untuk mengatasi tantangan yang dihadapi seperti ekonomi yang stagnan, politik yang kotor, korupsi politik, merosotnya standar pendidikan dan meningkatnya kejahatan, sangat tergantung pada kemampuan masyarakat madani Malay- sia sebagai bangsa untuk menginternalisasi dan membuat nyata prinsip- prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua, seluruh warga negara. Pandangan Anwar itu sangat kontekstual mengingat sejarah Islam di Asia Tenggara dikenal karena tradisi pluralistik dan inklusif, dan hubungan damai antara Muslim dan non-Muslim dari generasi ke generasi.

Sekali lagi, dengan bebasnya Anwar dari hukuman pengadilan, jalan politik Anwar makin lapang untuk meraih hari depan, meski tidak pernah ada ke- pastian untuk menang. Namun baginya, proses pergulatan dan perjuangan jauh lebih penting dan berharga, untuk kemudian berserah diri kepada Tuhan, Sang Maha Kuasa, yang telah membimbingnya menggerakkan reformasi di Malaysia. Setidaknya, sejak berada diluar kekuasaan, Datuk Anwar telah memimpin terus-menerus barisan oposisi untuk melancarkan perubahan dan pembaruan di negeri puak Melayu itu. Globalisasi demokrasi dari berbagai belahan bumi, termasuk dari Timur Tengah, memberikan implikasi yang konstruktif bagi gerakan kubu Anwar dalam mendobrak belenggu penindasan dan ketidakadilan.

Bagi Anwar, menang atau kalah dalam politik adalah soal lumrah sepanjang dilakukan secara beretika dan bermartabat. Oleh sebab itu, saya ingin menu- tup tulisan ini dengan kata- kata Anwar Ibrahim sendiri ketika dinyatakan bebas oleh pengadilan, “Terima kasih Tuhan, keadilan telah ditegakkan. Kami akan meneruskan sita-cita dan agenda perjuangan.”

Bibliografi

- A. Noor, Farish, “Politik Identitas dan Demokratisasi di Malaysia”, makalah, Pusat Studi Sosial Asia Tenggara, PAU Universitas Gadjah Mada, Kamis (23 April 2009).
- Chin, James dan Kai Leong, Ho (Ed.), *Mahathir’s Administration: Performance and Crisis in Governance* (Singapura: Times Academic Press, 2002).
- Fuller, Tom, “Trial of Opposition Leader Could Reshape Malaysian Politics”, *New York Times*, 1 Februari 2010.
- Gaban, Farid, “Renaissance Asia”, *Majalah Tempo*, 24 November 1998
- Gomes, Mathias dan Lee, Stan, “Anwar Will Be the Next Prime Minister, Does Any Bigot Have a Problem With That?”, *Malaysia Chronicle*, 26 Januari 2012.
- Gungwu, Wang, “Chinese Politics in Malaysia”, opini, *The China Quarterly*, 1970, Vol.43, H.1-30.
- Heryanto, Ariel dan K. Mandal, Sumit, *Challenging Authoritarianism in Southeast Asia, Comparing Indonesia and Malaysia* (New York & London: Routledge Curzon, 2003).
- Ibrahim, Anwar, *The Asian Renaissance*, (Singapura: Time Books International, 1998).
- Sahrasad, Herdi, “Pemilu Malaysia dan Anwar Ibrahim”, opini, *Republika*, Selasa, 19 Februari 2008.
- Wahid, Abdurrahman, “Anwar, UMNO dan Islam di Malaysia”, *Kompas*, Selasa, 20 Oktober 1998.
- Yatim, Usman, “Anwar Ibrahim dan Reformasi”, opini, *Madina*, Jakarta, 2011.